

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terbesar ke-5 di dunia dalam hal jumlah penduduk, termasuk negara yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk paling padat di dunia. Indonesia dari dahulu kala terkenal dengan kekayaan budaya lokalnya, kekayaan alamnya, keamanan dan ketentraman wilayahnya. Dari sektor pariwisata, negara ini banyak mempunyai spot wisata yang tidak kalah cantiknya dengan spot wisata di negara belahan dunia lain. Bahkan, salah satu pulau yang menjadi destinasi wisatanya telah mendunia, serta masyarakatnya yang ramah terhadap sesama penduduk lokal maupun mancanegara.

Dalam era dunia yang semakin dewasa ini, segala aspek kegiatan dalam kehidupan manusia semakin berkembang. Dibutuhkan kreatifitas dan strategi serta inovasi bagi setiap individu maupun kelompok dalam dunia usaha untuk menjawab tantangan serta perkembangan jaman. Perkembangan globalisasi juga menyediakan beragam penawaran barang maupun jasa untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Hal ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat itu sendiri.

Indonesia dipandang dunia mempunyai potensi pasar yang besar bagi para pelaku dunia usaha. Di samping itu, masyarakat Indonesia terkenal akan masyarakatnya yang berjiwa konsumtif. Atas dasar beberapa hal itulah, para

pelaku bisnis dari berbagai belahan dunia tertarik untuk membuka usahanya di negara ini.

Keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap dunia internasional membuat peluang pertumbuhan ekonomi negara ini semakin luas. Dari tahun ke tahun, arus dunia industri mengalami pertumbuhan. Para pengusaha, baik lokal maupun asing saling bersaing untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.

Untuk dapat memenuhi hajat hidup orang banyak tersebut, para pelaku dunia usaha berkeinginan untuk memperluas jangkauan usaha mereka, salah satunya dengan mendirikan unit-unit produksi baru. Maka dengan diperluasnya unit-unit tersebut membutuhkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tentu saja dampaknya sangat positif. Disamping untuk mengurangi tingkat pengangguran suatu daerah, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Para pelaku usaha yang mempunyai unit usaha di suatu daerah tentunya mempunyai kontribusi yang positif bagi daerahnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha restoran yang membuka usahanya di suatu kota, yang tidak ada cabangnya di kota lain, hal ini akan semakin menarik konsumen dari daerah lain untuk datang ke daerah tempat restoran tersebut berada. Dalam hal ini, usaha restoran mempunyai kontribusi positif bagi daerahnya, karena dari usaha restoran tersebut terdapat pajak restoran yang harus dibayar kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten. Dalam hal ini, pajak tersebut termasuk dalam *pajak daerah*.

Kemudian dari sektor lain, yakni pariwisata. Pariwisata juga merupakan kebutuhan masyarakat. Wisata merupakan kebutuhan rohani manusia. Dalam hal

ini, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang positif bagi suatu daerah. Kontribusi tersebut memberikan pengaruh pada pendapatan ekonomi suatu daerah. Pendapatan ekonomi salah satunya dari sektor pariwisata, ini yang disebut dengan *retribusi daerah*.

Dengan banyaknya sektor usaha yang tersebar di seluruh pelosok nusantara yang berpengaruh positif terhadap ekonomi negara, tentunya Pemerintah Pusat tidak dapat menangani tanggung jawab ini sendiri. Pemerintah Pusat mengandalkan bantuan kepada para Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangga, menggali potensi ekonomi daerah dan mengatur serta mengawasi segala aktifitas ekonomi di daerah. Hal inilah yang dinamakan *otonomi daerah*.

Pasca tahun 1998 terjadi beberapa perubahan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri melalui otonomi daerah. Pengelolaan keuangan ini berwujud adanya kewenangan daerah untuk menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus kegiatan rumah

tangga daerah dan berusaha meminimalisir ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Hak dan wewenang untuk menggali potensi keuangan daerah yang dimiliki juga Pemerintah Pusat pasrahkan kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan hajat hidup masyarakat banyak. (Kasyati,2015)

Berdasarkan hal tersebut mewujudkan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah dan mengoptimalkan sumber keuangan daerah dalam memajukan daerah serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Syaukani (2002) dalam Damaningrum (2013), menjelaskan bahwa otonomi daerah merancang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta hasil kerja dari Pemerintah daerah dari program pembangunan daerah adalah komunikatif, jaminan kelangsungan usaha, politik lokal yang aman, kreatifitas pemerintah, fasilitas, dan yang paling utama adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Jika lapangan kerja banyak tersedia, maka akan meningkatkan daya beli dan berpengaruh pada pajak. Jika daya beli masyarakat naik, akan meningkatkan pajak dan pendapatan asli daerah.

Salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerah berdasarkan pendapatan asli daerah.

Kemajuan ekonomi dalam penelitian ini juga produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) juga sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian Salakory (2013), menggunakan PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah yang juga

akan menunjukkan kemajuan suatu daerah. Penggunaan PDRB untuk mengukur kemajuan suatu daerah karena PDRB lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu PDRB juga menunjukkan kemajuan suatu daerah dikarenakan indikator ini mampu mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemampuan daerah meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PDRB dan PAD sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian Asteria (2015), yang menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

Sedangkan Mutiara (2015) menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur selama periode 2004-2013. Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Penelitian Damaningrum (2015), yang menambahkan Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel bebasnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat dari penelitiannya. Adapun populasi dalam penelitiannya adalah Pemerintah Kota Surakarta periode 1990-2013. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa PDRB terpengaruh oleh pajak daerah dan jumlah penduduk, namun untuk retribusi daerah dan pengeluaran Pemerintah tak mempengaruhi PDRB Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap PAD Jawa Tengah periode 2013 – 2016?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap PAD Jawa Tengah periode 2013 – 2016?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Jawa Tengah periode 2013 – 2016?

4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Jawa Tengah periode 2013 – 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD Jawa Tengah periode 2013 – 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PAD Jawa Tengah periode 2013 – 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Jawa Tengah periode 2013 – 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Jawa Tengah periode 2013 – 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dalam sebuah penelitian pastilah memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Untuk itu setelah mengetahui latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai tambahan wawasan mengenai peran pajak daerah dan retribusi hiburan terhadap kemajuan suatu daerah.
2. Bagi kalangan Akademis, sebagai tambahan ilmu yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan.

3. Bagi Pemerintah, sebagai bahan evaluasi kinerja dalam rangka memungut pajak daerah dan retribusi daerah bagi suatu daerah.
4. Bagi Pelaku bisnis hiburan, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi mereka terhadap keuangan atau pendapatan suatu daerah.
5. Bagi Masyarakat, untuk memotivasi agar mereka juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah demi kemajuan pembangunan suatu daerah.